**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN WALIKOTA DALAM MEWUJUDKAN KAMPUNG BERSIH AMAN DAN PINTAR (BANTAR) DI KECAMATAN KOTA BARU KOTA JAMBI**

Aulia Cindy Dwi Putri

Program Studi Kebijakan Pemerintahan Fakultas Politik Pemerintahan

Institut Pemerintahan Dalam Negeri

E-mail:[auliacindydjb@gmail.co](mailto:auliacindydjb@gmail.co)m

**ABSTRAK**

Penelitian ini berjudul **“IMPLEMENTASI KEBIJAKAN WALIKOTA DALAM MEWUJUDKAN KAMPUNG BERSIH AMAN DAN PINTAR (BANTAR) DI KECAMATAN KOTA BARU KOTA JAMBI”** untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan Kampung BANTAR dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan Kampung BANTAR di Kecamatan Kota Baru Kota Jambi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program Kampung BANTAR di Kecamatan Kota Baru belum berjalan efektif. Terbukti dengan belum keseluruhan RT yang ada di Kecamatan Kota Baru mengikuti program Kampung BANTAR. Faktor penghambat pelaksanaan program adalah kurangnya pemahaman masyarakat terhadap program dan tidak adanya keberlanjutan program. Sedangkan yang menjadi faktor pendukung program ini dapat terlaksana adalah adanya kepemimpinan yang bersifat *political will* dan adanya sarana dan prasarana yang mendukung. Adapun upaya yang dilakukan Pemerintah Kecamatan Kota Baru untuk mengatasi hambatan adalah membuat program kecamatan yang mendukung program Kampung BANTAR yaitu GERTAK BERSATU dan membuat program lanjutan dari program Kampung BANTAR yaitu Kampung BANTAR Kencana. Berdasarkan hal tersebut peneliti memberi rekomendasi saran yaitu perlunya sosialisasi yang berkesinambungan dan penyebaran informasi tentang program yang lebih terbuka, perlu adanya CSR *(Corporate Social Responsibility)* dari perusahaan-perusahaan di wilayah Kampung BANTAR, pembagian juknis untuk pelaksana program dan ditambahnya sarjana pendamping program Kampung BANTAR.

Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Kampung BANTAR

***ABSTRACT***

*This research is titled* ***"THE IMPLEMENTATION OF THE MAYOR POLICY IN REALIZING THE VILLAGE CLEAN SAFE AND SMART (BANTAR) IN THE DISTRICT KOTA BARU JAMBI CITY"*** *to find out how the policy implementation BANTAR village and the factors that influence the implementation of BANTAR Village policy in the district of Kota Baru Jambi City. The method used in this research is a qualitative method. The results of this researchers showed that the implementation of* Kampung BANTAR *program in Kota Baru Sub-district has not been effective. Proven with the whole new RT that exists in the district of Kota Baru following the program Kampung BANTAR. The inhibitory factor of program implementation is the lack of public understanding of the program and the absence of program sustainability. While the contributing factor of this program can be done is the leadership of political will and the facilities and infrastructures that support. The efforts undertaken by the new city district government to overcome the obstacles is to create a sub-district program that supports the* Kampung BANTAR *program, which is* GERTAK BERSATU *and make further program from* Kampung BANTAR *program namely* Kampung BANTAR Kencana*. Based on this, researchers give recommendations on the need for ongoing socialization and dissemination of information about the more open programs, the need for CSR (Corporate Social Responsibility) of companies in The village of BANTAR, a division of the company for program executor and the accompanying Bachelor of the BANTAR program.*

*Keywords: implementation, policy,* Kampung BANTAR

# PENDAHULUAN

# Latar Belakang Penelitian

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kota Jambi yaitu “TERWUJUDNYA KOTA JAMBI SEBAGAI PUSAT PERDAGANGAN DAN JASA BERBASIS MASYARAKAT YANG BERAKHLAK DAN BERBUDAYA” berbagai inovasi terus di bangun jajaran pemerintah kota guna mengimplementasikan programnya di tengah-tengah masyarakat. Hal tersebut tidak terlepas dari peran kepemimpinan Walikota Jambi Dr. H. Syarif Fasha, ME. Kebijakan Kampung BANTAR salah satu inovasi yang dibuat oleh beliau yang merupakan akronim dari Kampung Bersih, Aman, dan Pintar.

Poin terpenting dari lahirnya inovasi Kampung BANTAR ini adalah keinganan yang kuat dari dirinya sebagai kepala daerah untuk kembali menggairahkan semangat dan nilai luhur bangsa Indonesia sejak dahulu yaitu semangat gotong royong, yang cenderung memudar dewasa ini di tengah masyarakat perkotaan akibat pengaruh modernisasi kehidupan masyarakat yang semakin individualis.

Untuk meningkatkan partisipasi dan antusias masyarakat Kota Jambi agar kampungnya ikut melaksanakan program Kampung BANTAR, Pemerintah Kota Jambi berinisiatif untuk memberikan *reward* kepada Kampung BANTAR terbaik se-Kota Jambi dengan hadiah uang tunai hingga Rp.15.000.000,00 juta.Namun dalam pelaksanananya program Kampung BANTAR ini masih menemui banyak kendala salah satunya belum semua RT/kampung yang berada di Kota Jambi mengikuti program Kampung BANTAR ini. Menurut data dari website Kampung BANTAR Kota Jambi yang terdapat pada tabel 1.1.

**Tabel 1.1**

**Lokasi Kampung BANTAR di Kota Jambi**

**Tahun 2015-2016**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Kecamatan** | **Jumlah Kelurahan** | **Jumlah RT** | **Pengusulan RT untuk mengikuti Lomba Kampung Bantar (2015)** | **Terlaksana (2015)** | **Pengusulan RT untuk mengikuti Lomba Kampung Bantar (2016)** | **Terlaksana (2016)** |
|
| 1 | Jambi Timur | 9 | 192 | 17 | 12 | 33 | 16 |
| 2 | Telanaipura | 6 | 127 | 26 | 9 | 32 | 17 |
| 3 | Danau sipin | 5 | 150 | 17 | 5 | 12 | 4 |
| 4 | Pelayangan | 6 | 46 | 13 | 11 | 7 | 6 |
| 5 | Danau Teluk | 5 | 44 | 14 | 14 | 3 | 3 |
| 6 | Pasar | 4 | 58 | 14 | 10 | 5 | 5 |
| 7 | Kota Baru | 5 | 165 | 12 | 9 | 15 | 11 |
| 8 | Alam Barajo | 5 | 184 | 14 | 6 | 13 | 7 |
| 9 | Jelutung | 7 | 233 | 16 | 15 | 12 | 9 |
| 10 | Jambi Selatan | 5 | 149 | 11 | 10 | 12 | 6 |
| 11 | Pall Merah | 5 | 214 | 11 | 8 | 12 | 4 |
|  | **Jumlah** | **62** | **1562** | **165** | **109** | **156** | **88** |

*Sumber:http://kampungbantarkotajambi.blogspot.com/p/surat-keput.html*

Dari tabel 1.1 di atas dapat dilihat bahwa dari 1562 RT/kampung yang ada di Kota Jambi, pada tahun 2015 hanya ada 165 RT/kampung yang memenuhi kriteria Kampung BANTAR yang diajukan oleh kelurahan untuk dapat mengikuti lomba Kampung BANTAR di seluruh kecamatan. Namun dari 165 RT/kampung hanya 109 RT/kampung yang menyanggupi untuk melaksanakan program ini dan pada tahun 2016 turun menjadi 88 RT/kampung yang melaksanakan program Kampung BANTAR dari 156 RT/kampung usulan kelurahan. Hal ini menunjukkan bahwa di Kota Jambi belum keseluruhan RT/kampung yang mengikuti Kampung BANTAR. Masih banyak RT/kampung yang belum mengajukan usulan untuk mengikuti Kampung BANTAR karena kurangnya kesiapannya RT/kampung memenuhi standar kriteria bersih aman dan pintar.

**Tinjauan Teoritis**

Implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik. Suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Van Meter dan Van Horn mengungkapkan bahwa implementasi kebijakan sebagai “Tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau kelompok-kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan sebelumnya”.[[1]](#footnote-1)

Menurut James Anderson memberikan pengertian kebijakan publik sebagai “Kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh badan-badan atau pejabat pemerintah”.[[2]](#footnote-2)

Kebijakan publik juga memiliki makna luas seperti pendapat dari Dye yang mengatakan kebijakan publik sebagai *“Whatever governments choose to do or not to do”,[[3]](#footnote-3)* yang artinya apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan.

Dari berbagai pandangan di atas mengenai definisi kebijakan publik, peneliti menyimpulkan bahwa kebijakan publik adalah keputusan yang telah ditetapkan oleh pemerintah melalui serangkaian pola tindakan dan kegiatan yang terprogram dalam rangka merealisasikan tujuan negara.

Keberhasilan implementasi kebijakan akan ditentukan oleh banyak variabel atau faktor, dan masing-masing variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain. Merilee S. Grindle memberikan pendapat tentang implementasi dengan mengatakan bahwa “Secara umum, tugas implementasi adalah membentuk suatu lingkungan yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah”.[[4]](#footnote-4) Merilee S. Grindle dalam mengukur keberhasilan implementasi dapat dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan *(content of policy)* dan lingkungan implementasi *(context of implementation).[[5]](#footnote-5)*

Dalam penelitian ini untuk mengukur keberhasilan Implementasi program Kampung BANTAR di Kecamatan Kota Baru Kota Jambi yang menjadi fokus penelitian bagi peneliti digunakan teori Grindle dikarenakan menurut Grindle keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya diukur dari proses pencapaian hasil akhir *(outcome),* yaitu tercapai atau tidaknya tujuan kebijakan dengan melihat dampak pada masyarakat dan perubahan yang terjadi tetapi keberhasilan implementasi kebijakan diukur dari prosesnya dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditentukan *(design)* dengan merujuk pada aksi .Keberhasilan implementasi kebijakan menurut Grindle ditentukan oleh tingkat *implmentability* kebijakan itu sendiri yang terdiri atas :

1. Isi Kebijakan yang mencakup:

1. Kepentingan yang dipengaruhi
2. Jenis Manfaat
3. Derajat Perubahan Yang Diinginkan
4. Letak Pengambilan Keputusan
5. Pelaksana Program
6. Sumber Daya

2. Lingkungan Implementasi yang mencakup:

1. Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat
2. Karakteristik lembaga dan penguasa
3. Kepatuhan dan daya tanggap

**METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Melalui pendekatan kualitatif deskriptif peneliti bermaksud untuk melakukan pemaparan mengenai gejala-gejala yang terdapat di dalam masalah penelitian yaitu mendeskripsikan kejadian empiris mengenai dampak yang sebenarnya terjadi dalam implementasi kebijakan walikota dalam mewujudkan kampung bersih aman dan pintar di Kecamatan Kota Baru Kota Jambi guna memperoleh gambaran umum serta menyesuaikan dengan keadaan.

Peneliti menggunakan pendekatan deskriptif karena data yang dikumpulkan melalui data-data yang berupa kata-kata, gambar bukan angka. Selanjutnya penelitian ini menggunakan cara berfikir induktif dimana berfikir induktif berangkat dari temuan fakta yang khusus menuju sebuah pernyataan yang umum.

Dalam penelitian ini informan peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* dan *snowball sampling*. *Pusposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan menentukan subjek atau objek yang menggunakan pertimbangan tertentu sesuai dengan tujuan dan topik penelitian sebagai unit analisisnya. Sedangkan teknik *snowball sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data yang pada awalnya jumlahnya sedikit lama-lama menjadi besar. Hal ini dilakukan karena dari jumlah sumber data yang sedikit itu belum mampu memberikan data yang memuasakan, maka mencari orang lain lagi yang dapat digunakan sebagai sumber data.

**PEMBAHASAN**

**Isi Kebijakan (Content of Policy)**

**Kepentingan yang Dipengauhi oleh Kebijakan**

Kepentingan yang dipengaruhi dalam pelaksanaan program kampung BANTAR adalah seluruh masyarakat yang bermukim di lingkungan RT di Kota Jambi.

**Tabel 1.2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Kecamatan** | **Jumlah RT** | **Jumlah RT yang Ikut Kampung BANTAR (2015)** | **Jumlah RT yang Ikut Kampung BANTAR (2016)** | **Jumlah RT yang Ikut Kampung BANTAR (2017)** | **Jumlah RT yang Ikut Kampung BANTAR (2018)** | **Total RT Kampung BANTAR** | **(%) Capaian Kampung BANTAR 2015-2018** |
| 1 | Jambi Timur | 192 | 17 | 33 | 8 | 11 | 69 | 36% |
| 2 | Telanaipura | 127 | 26 | 32 | 9 | 16 | 83 | 65% |
| 3 | Danau sipin | 150 | 17 | 12 | 11 | 15 | 56 | 37% |
| 4 | Pelayangan | 46 | 13 | 7 | 4 | 6 | 27 | 59% |
| 5 | Danau Teluk | 44 | 14 | 3 | 7 | 6 | 31 | 70% |
| 6 | Pasar | 58 | 14 | 5 | 6 | 10 | 35 | 60% |
| 7 | Kota Baru | 165 | 12 | 15 | 15 | 19 | 61 | 37% |
| 8 | Alam Barajo | 184 | 14 | 13 | 14 | 15 | 56 | 30% |
| 9 | Jelutung | 233 | 16 | 12 | 10 | 10 | 54 | 23% |
| 10 | Jambi Selatan | 149 | 11 | 12 | 17 | 9 | 50 | 34% |
| 11 | Pall Merah | 214 | 11 | 12 | 12 | 23 | 59 | 28% |
| **Jumlah** | | **1562** | **165** | **156** | **113** | **140** | **581** | **37%** |

**Jumlah RT yang Sudah Ikut Kampung BANTAR (2015-2018)**

*Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2019*

Berdasarkan tabel 1.3 di atas bahwa belum keseluruhan RT yang ada di Kecamatan Kota Baru mengikuti program Kampung BANTAR. Terbukti dari 165 RT yang ada di Kecamatan Kota Baru hanya 61 RT yang mengikuti program Kampung BANTAR hingga akhir tahun 2018. Hal ini menunjukkan bahwa capaian program Kampung BANTAR di Kecamatan Kota Baru hanya sebesar 37%. Padahal progam ini sudah berjalan hampir 5 tahun sejak tahun 2014. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian masyarakat Kecamatan Kota Baru belum merespon adanya program ini.

**Jenis Manfaat**

Berdasarkan yang peneliti lakukan bahwa dengan adanya program Kampung BANTAR di Kecamatan Kota Baru memberikan dampak terhadap perubahan lingkungan yang menjadi tertata rapi dan bersih serta perubahan tingkah laku masyarakat yang menjadi semakin peduli terhadap lingkungan namun disisi lain untuk keberlanjutan program ini masih dipertanyakan karena belum mencakup secara keseluruhan masyarakat karena dianggap program ini hanya sebatas formalitas pada saat penilaian perlombaan akan dilaksanakan. Hal ini disebabkan karena belum adanya pengawasan yang rutin dari tim pembina Kampung BANTAR terhadap RT setelah proses penilaian dilaksanakan.

**Derajat Perubahan yang Diinginkan**

Dampak yang dirasakan oleh masyarakat dengan adanya program Kampung BANTAR di Kecamatan Kota Baru ini cukup baik. Unsur bersih dilihat dengan kondisi lingkungan RT yang tidak ada sampah dan tertata rapi dengan banyak tanaman-tanaman obat yang ditanami di area pekarangan rumah warga dan pemanfaatan kembali barang-barang bekas menjadi barang layak pakai. Unsur aman dilihat dari tidak ada lagi kasus kriminal di RT-RT Kampung BANTAR karena kegiatan ronda malam aktif dilaksanakan.

Namun unsur pintar dari Kampung BANTAR di Kecamatan Kota Baru ini masih belum maksimal dalam realisasinya terbukti dengan hanya mendirikan pojok bacaan tanpa adanya upaya lain sesuai indikator-indikator yang termuat dalam PERWALI Nomor 40 Tahun 2014 bahwa unsur pintar yaitu lingkungan yang bebas buta aksara, angka putus sekolah, pengangguran, memiliki lembaga pemberdayaan ekonomi masyarakat, memiliki lembaga atau kelompok pendidikan dalam peningkatan sumber daya manusia (seperti taman anak sejahtera, rumah pintar, kelompok dasawisma, taman pendidikan Al Quran), memiliki kelompok organisasi sosial, kemasyarakatan, kepemudaan dan keagamaan (seperti karang taruna, Pokja-Pokja PKK, kelompok masyarkaat peduli pajak).

**Letak Pengambil Keputusan**

Letak pengambilan keputusan Kampung BANTAR yaitu Keputusan Walikota Jambi yang ditujukan untuk seluruh masyarakat Kota Jambi yang bermukim di lingkungan RT. Jika terjadi hambatan dalam pelaksanaan Kebijakan Kampung BANTAR maka pemerintah dalam hal ini baik Camat Kota Baru selaku pimpinan kecamatan maupun Lurah se Kecamatan Kota Baru akan berkoordinasi melakukan evaluasi dan monitoring agar kebijakan Kampung BANTAR di wilayahnya dapat berjalan dengan baik.

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti di lapangan bahwa Camat Kota Baru selaku penanggung jawab pelaksanaan program Kampung BANTAR di Kecamatan Kota Baru selalu melakukan koordinasi dengan lurah-lurahnya untuk mendata RT mana saja yang mau mengikuti Kampung BANTAR. Kasi PMK Kecamatan Kota Baru bersama sarjana pendamping Kecamatan Kota Baru menjadwalkan seminggu sekali untuk turun ke lapangan melakukan pembinaan kepada masyarakat Kecamatan Kota Baru yang RTnya mengikuti Kampung BANTAR.

**Pelaksana Program**

Setiap tahunnya tim penilai diganti namun tetap dari perwakilan SKPD terkait dan sarjana pendamping masih ditentukan oleh BPM itu sendiri. Namun tidak ada perintah lain untuk SKPD terkait selain dari menilai padahal pelaksanaan program ini oleh masyarakat sangat dibutuhkan pembinaan dan pengajaran lebih lanjut yang harus lebih turun ke masyarakat.

Hal ini menunjukkan bahwa pelaksana program Kampung BANTAR belum melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai ketentuan yang berlaku terlihat dari tim pembina dari SKPD terkait yang telah ditetapkan oleh Keputusan Walikota belum melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai tim pembinaan. SKPD terkait hanya melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai tim penilaian Kampung BANTAR.

Pihak pemerintah yang terlibat dalam implementasi kebijakan Kampung BANTAR adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat, Badan Lingkungan Hidup, Dinas Kebersihan, Pemakaman, dan Pertamanan, Dinas Kesehatan, Polresta Jambi, Dinas Pendidikan, Tim Penggerak PKK namun kenyataannya belum terjadi koordinasi yang baik antar instansi sehingga pelaksana Kampung BANTAR hanya dari Badan Pemberdayaan Masyarakat, Aparat Kecamatan, Aparat kelurahan, RT, PKK, Sarjana Pendamping, dan Tokoh Masyarakat namun tim sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Walikota Nomor 47 Tahun 2014 sebagai perwakilan SKPD hanya ikut menilai saja tanpa melakukan pembinaan kepada masyarakat.

**Sumber Daya yang Dilibatkan**

Kebijakan Kampung BANTAR ini sumber daya yang terlibat menjadi 3 (tiga) golongan antara lain sumber daya manusia, anggaran dan sarana prasarana.

Yang pertama sumberdaya manusia yang mana sumber daya manusia memegang peranan penting dalam menentukan berhasil tidaknya suatu kebijakan.Sarjana pendamping memiliki peran yang sangat besar untuk menumbuhkan rasa peduli dalam lingkungan dan juga keikutsertaan masyarakat Kota Jambi dalam program Kampung BANTAR. Sarjana pendamping memiliki tupoksi yang lebih banyak dan sedikit rumit dari aparat kecamatan maupun kelurahan, yaitu melakukan pendekatan kepada masyarakat kecamatan, memberi pemahaman mengenai Kampung BANTAR kepada masyarakat di wilayahnya, mendampingi tim penilai saat penilaian, dan ikut menilai saat penilaian. Sarjana pendamping Kecamatan Kota Baru total RT yang ada yaitu 165 RT namun jumlah sarjana pendamping hanya ada satu. Hal inilah yang membuat belum semua RT mendapatkan pembinaan karena jumlah personil sarjana pendamping yang belum memadai.

Pelaksanaan program Kampung BANTAR menggunakan dana dari hasil swadaya masyarakat untuk memperindah dan memperbaiki lingkungannya. Pendanaan dibebankan pada masyarakat di setiap Kampung/RT yang terdapat di Kecamatan Kota Baru. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program Kampung BANTAR adalah kendala biaya dalam pembuatan Kampung BANTAR yang menggunakan swadaya dari masyarakat.

Yang ketiga adalah sarana dan prasarana yang mana sarana dan prasarana dalam program ini menyesuaikan kemampuan RT di wilayah Kecamatan Kota Baru. Menurut hasil observasi peneliti saat mengunjungi beberapa kelurahan di Kecamatan Kota Baru masih terlihat secara menyeluruh prasarana dasar masih kurang dikarenakan tidak adanya biaya.

Dari uraian di atas dapat di ketahui bahwa ketiga golongan sumber daya yang terlibat dalam pelaksanaan Kebijakan Kampung BANTAR di Kecamatan Kota Baru masih belum memadai dimana untuk sumber daya manusia masih terkendala dengan kekurangan sarjana pendamping untuk melakukan pendekatan kepada masyarakat dan pembinaan yang hanya ada satu di setiap kecamatan padahal jumlah RT yang ada di setiap kecamatan mencapai ratusan. Selain itu pelaksanaan program Kampung BANTAR terkendala dengan dana yang berasal swadaya masyarakat yang mana mayoritas warga yang ada di Kecamatan Kota Baru memiliki status ekonomi menengah ke bawah sedangkan untuk sarana dan prasarana menyesuaikan dengan kemampuan RT di wilayah Kecamatan Kota Baru.

**Kekuasaan, Kepentingan dan Strategi Aktor yang Terlibat**

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti di lapangan menyatakan bahwa strategi yang dilakukan oleh para aktor yang terlibat masih belum menyelesaikan masalah yang ada dikarenakan proses sosialisasi yang tidak dilakukan secara rutin dilakukan menyebabkan program yang hampir 5 tahun berjalan ini belum mencapai tujuan program yaitu menjadikan seluruh kampung yang ada di Kecamatan Kota Baru menjadi Kampung BANTAR ( Bersih Aman dan Pintar) terbukti masih dari 166 RT yang ada di Kota Jambi sampai akhir 2018 kemarin baru 61 RT yang mengikuti Kampung BANTAR ini.

**Karakteristik Lembaga dan Penguasa**

Kebijakan Kampung BANTAR ini bukan strategi kepala daerah untuk mepertahankan kekuasaan melainkan memang untuk memajukan masyarakat Kota Jambi karena Bapak Walikota sendiri merupakan putra asli dari daerah Kota Jambi.

**Kepatuhan dan Daya Tanggap**

Tanggapan dan kepatuhan masyarakat dengan adanya program Kampung BANTAR terdapat perbedaan ada pihak masyarakat yang setuju karena membawa dampak positif terhadap lingkungan dan ada yang tidak setuju karena pelaksanan program ini tidak ada keberlanjutannya. Namun permasalahan Kampung BANTAR ini belum memberikan dampak pada seluruh masyarakat masih banyak RT yang belum melaksanakan program ini sehingga dapat dikatakan kepatuhan *target group* atau kelompok sasaran yakni masyarakat masih sangat kurang.

**Faktor Pendukung**

Berdasarkan hasil penelitian bahwa yang menjadi faktor pendukung program Kampung BANTAR bisa berjalan dengan baik di Kecamatan Kota Baru adalah adanya kepemimpinan yang memiliki political will atau perhatian terhadap penerapan Kampung BANTAR.

keberadaan pemimpin berpengaruh pada spirit masyarakat, untuk itu ia perlu hadir dalam proses *being in the zone* , jadi seorang pemimpin harus mampu memberikan contoh kepada masyarakat bukan hanya sekedar memerintah saja melainkan turun langsung ke lapangan melihat kondisi yang terjadi dan mampu memperbaiki kekurangan yang ada.

Selain itu berdasarkan hasil penelitian bahwa yang menjadi faktor pendukung lainnya program Kampung BANTAR dapat berjalan di Kecamatan Kota Baru adalah tersedianya sarana dan prasarana mewujudkan Kampung Bersih Aman dan Pintar.

**Faktor Penghambat**

1. **Kurangnya Pemahaman Masyarakat Mengenai Program Kampung BANTAR**

Pemahaman masyarakat Kecamatan Kota Baru yang masih kurang terhadap program Kampung BANTAR, merupakan akibat dari proses sosialisasi yang tidak merata keseluruh masyarakat Kecamatan Kota Baru. Hal ini di karenakan kurangnya koordinasi antar pelaksana program Kampung BANTAR.

1. **Keberlanjutan Program**

Pelaksanaan program ini hanya sebatas waktu perlombaan namun ketika setelah selesai perlombaan pemenang tersebut tidak berlanjut dalam merawat dan menjaga kebersihan lingkungan mereka sehingga pelaksanaan Program Kampung BANTAR ini hanya sebatas formalitas waktu perlombaan akan dilaksanakan namun setelah lomba selesai dilaksanakan RT yang mengikuti Kampung BANTAR belum bisa mempertahankan untuk merawat dan menjaga kebersihan lingkungan mereka.

**Upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Jambi untuk Mengatasi Hambatan Implementasi Kebijakan Walikota dalam Mewujudkan Kampung Bersih Aman dan Pintar (BANTAR) di Kecamatan Kota Baru Kota Jambi**

1. **Upaya untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat**

Upaya yang dilakukan Camat Kota Baru dalam membantu meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan dengan cara mengajak masyarakat melakukan kegiatan gotong royong bersama aparat kecamatan sehingga masyarakat merasakan bahwa pemerintah itu bukan cuman bisa memerintah saja melainkan juga memberikan contoh yang nyata dan dukungan kepada masyarakat.

Jadi upaya pemerintah Kecamatan Kota Baru untuk meningkatkan partisipasi masyarakat agar mau mengikuti Kampung BANTAR adalah dengan membuat program kecamatan yang mendukung program Kampung BANTAR yaitu dengan program GERTAK BERSATU yang merupakan kepanjangan dari Gerakan Serentak Bersih, Sehat, Terpadu. Gerakan gotong royong yang dilakukan setiap satu kali dalam seminggu yaitu pada hari Jumat dimana semua aparat kecamatan turun langsung ke kelurahan-kelurahan di Kota Baru untuk melakukan Jumat bersih bersama masyarakat.

**B. Upaya Mengatasi Keberlanjutan Program Kampung**

**BANTAR**

Upaya Pemerintah Kota untuk mengatasi hambatan dalam implementasi program Kampung BANTAR yang dalam kenyataaanya di lapangan program ini hanya bersifat formalitas yang dijalankan oleh masing-masing RT dan tidak ada keberlanjutannya adalah dengan membuat program lanjutan yaitu Kampung BANTAR Kencana agar masyarakat bisa mempertahankan kampungnya untuk tetap bersih aman dan pintar bukan hanya pada saat akan perlombaan saja melainkan pada saat setelah perlombaan kampungnya tetap tertata rapi bersih dengan kondisi aman dan memiliki masyarakat yang pintar. Dengan adanya Kampung BANTAR Kencana diharapkan program ini pelaksanaannya bukan hanya sesaat dan tidak akan berlanjut melainkan menjadi suatu pola pendidikan bagi masyarakat untuk membiasakan agar peduli terhadap kondisi lingkungan.

**KESIMPULAN**

Implementasi kebijakan walikota dalam mewujudkan Kampung Bersih Aman dan Pintar (BANTAR) di Kecamatan Kota Baru Kota Jambi belum berjalan efektif. Hal ini dibuktikan dengan belum keseluruhan RT yang ada di Kecamatan Kota Baru mengikuti Program Kampung BANTAR. Beberapa alasan program ini belum memberikan hasil yang optimal adalah belum meratanya sosialisasi tentang program, tim pelaksana yang belum menjalankan tupoksinya dan kurangnya jumlah sarjana pendamping program Kampung BANTAR.

Faktor pendukung implementasi kebijakan walikota dalam mewujudkan Kampung Bersih Aman dan Pintar (BANTAR) di Kecamatan Kota Baru Kota Jambi adalahadanya kepemimpinan yang memiliki *political will* atau perhatian terhadap penerapan Kampung Bersih Aman dan Pintar (BANTAR) dan tersedianya sarana dan prasarana mewujudkan Kampung Bersih Aman dan Pintar (BANTAR) sedangkan faktor yang menjadi penghambat program Kampung BANTAR di Kecamatan Kota Baru Kota Jambi adalah kurangnya pemahaman masyarakat mengenai program Kampung Bersih Aman dan Pintar (BANTAR) dan tidak ada keberlanjuatan dalam mewujudkan Kampung Bersih Aman dan Pintar.

Adapun upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Jambi untuk mengatasi hambatan Impementasi Kebijakan Walikota dalam Mewujudkan Kampung Bersih Aman dan Pintar (BANTAR) di Kecamatan Kota Baru Kota Jambi adalah membuat program kecamatan yang mendukung program Kampung BANTAR yaitu program GERTAK BERSATU (Gerakan Serentak Bersih, Sehat, Terpadu) dan membuat program lanjutan dari program ini yaitu program Kampung BANTAR Kencana.

**DAFTAR PUSTAKA**

Hamdi, Muchlis. 2014. *Kebijakan Publik : Proses, Analisis, dan Partisipasi. Bogor*: Ghalia Indonesia.

Subarsono, A.G. 2011. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik: Teori, proses, dan Studi Kasus*.

1. Budi Winarno, *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus* (Yogyakarta: Tim Redaksi 2012), hlm. 149. [↑](#footnote-ref-1)
2. Muchlis Hamdi, Op.Cit., hlm. 36. [↑](#footnote-ref-2)
3. William N Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik* ( Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2003) , hlm. 109. [↑](#footnote-ref-3)
4. Budi Winarno, Op.Cit., hlm. 149. [↑](#footnote-ref-4)
5. A. G. Subarsono, Op.Cit., hlm. 93. [↑](#footnote-ref-5)